

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat yang membutuhkan pergerakan dan perpindahan disetiap aktivitasnya, maka sarana transportasi yang mendukung sangatlah dibutuhkan untuk mempermudah melakukan kegiatan mobilitas tersebut. Dengan adanya transportasi umum maka perpindahan dan pergerakan masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lain sangatlah mungkin, bahkan tidak hanya perpindahan dan pergerakan orang saja namun juga perpindahan barang melalui angkutan umum barang.

Dalam hal untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakatnya Pemerintah memberikan fasilitas transportasi massal yaitu diantaranya adalah Angkutan Kota(Angkot), Bus Kota, Bus Antar Kota Dalam Provinsi, Bus Antar Provinsi, Kereta Api, dan Kapal laut. Bukan hanya Pemerintah bahkan pihak swasta pun ikut menyediakan jasa transportasi umum kepada masyarakat.

Dagun et. al (2006) dalam Rifusua (2010) menyatakan bahwa, transportasi publik yang baik harus memenuhi tiga kriteria dasar, yaitu: kenyamanan, keamanan, dan kecepatan, serta ketepatan.¹ Kriteria pertama, kenyamanan. Aspek kenyamanan dapat dirasakan oleh penumpang apabila terdapat fasilitas seperti pendingin udara, dan tertutup dari asap polusi kendaraan bermotor. Kriteria kedua, keamanan. Sistem keamanan pada naik turun penumpang harus

¹Rifusua, Agus Imam. 2010, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Busway di DKI Jakarta Tahun 2004-2008*. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

pada terminal atau halte bus yang telah ditentukan. Kriteria ketiga, kecepatan. Terpenuhi waktu secara cepat dan tepat untuk sampai pada tempat tujuan, seperti kereta api yang memiliki jalur khusus sehingga waktu yang diperkirakan dapat sesuai.² Namun pada kenyataannya, transportasi massal yang juga merupakan transportasi dari pelayanan publik di kota-kota besar Indonesia, masih jarang yang memenuhi ketiga kriteria tersebut. Lambat laun transportasi publik di Indonesia memiliki kelemahan dan mengalami penurunan. Kelemahan-kelemahan transportasi publik di Indonesia dapat disebabkan karena sistem penyelenggaraannya yang mulai kurang diperhatikan.

Perlu diketahui, terdapat persoalan yang tidak bisa lepas dari transportasi massal, antara lain adalah; tidak adanya jadwal yang tetap, pola rute yang memaksa pengguna harus transfer atau oper, penumpang yang berlebih saat jam sibuk, kondisi internal dan eksternal yang buruk, dan cara mengemudikan kendaraan yang sembarangan dan membahayakan keselamatan.³

Seiring dengan banyaknya permasalahan yang muncul dari transportasi massal dan bersamaan dengan perkembangan teknologi, saat ini telah hadir inovasi terbaru untuk menjawab segala permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat dalam menggunakan transportasi massal yaitu dengan munculnya beberapa alternatif angkutan umum berupa angkutan ojek online dan taxi

² Slaudiya Anjani. 2016. *Jurnal Ilmiah Tentang Transportasi Berbasis Aplikasi Online: Gojek Sebagai Sarana Transportasi Masyarakat Kota Surabaya*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya

³ Amajida, Fania Darma. 2016, *Kreativitas Digital Dalam Masyarakat Risiko Perkotaan: Studi Tentang Ojek Online "Go-Jek" di Jakarta*. Departmen Sosiologi Universitas Indonesia. Jurnal Informasi Kajian Ilmu Komunikasi Volume 46. Nomor 1. Juni 2016.

online. Ojek online dan taxi online akhir-akhir ini banyak digemari oleh masyarakat karena memiliki banyak keunggulan dibanding dengan jenis angkutan umum yang lainnya. Keunggulan dari taxi dan ojek online yaitu tidak sama seperti taxi atau ojek yang ada pada umumnya, karena taxi dan ojek online terintegrasi dengan aplikasi yang terdapat di smartphone. Taxi dan ojek online diselenggarakan oleh suatu perusahaan yang mana perusahaan berfungsi sebagai penerima pesanan dari calon pelanggan pengguna jasa yang memesan melalui aplikasi smartphone tersebut.⁴

Dengan cepatnya perkembangan teknologi informasi telah membuat proses dan strategis bisnis transportasi umum berubah dengan cepat. Tidak ada lagi manajemen perusahaan yang tidak peduli dengan persaingan produk dari rival bisnisnya, Penggunaan perangkat teknologi informasi sudah menjadi keharusan bagi perusahaan transportasi umum, yang dapat dilihat dari anggaran belanja sampai dengan implementasi teknologi informasi di sebuah perusahaan.⁵ Telah banyak bermunculan penyedia jasa transportasi yang mengembangkan usaha mereka dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana usaha salah satunya yaitu berbentuk ojek online.

Saat ini ada banyak penyedia jasa ojek online di Indonesia, namun yang terkenal dan sudah bisa dikatakan sebagai raksasa penyedia jasa transportasi online adalah Go-Jek dan Grab. Semua memberikan pelayanan yang hampir sama mulai dari mengantarkan orang dengan biaya yang berbeda-beda, namun

⁴Anak Agung. 2016. *Skripsi Tentang Pertanggungjawaban Ojek Online Terhadap Penumpang Apabila Terjadi Kecelakaan*. Fakultas Hukum. Universitas Jember

⁵Timothy K. L. Tobing. 2017. *Jurnal Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transportasi Berbasis Aplikasi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*. Fakultas Hukum. Universitas Samratulangi

dengan sistem pemesanan yang sama yaitu pemesanan melalui aplikasi telepon genggam maupun website.⁶

Dengan hadirnya jasa transportasi online saat ini sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Namun disisi lain adanya transportasi online ini juga menimbulkan pro-kontra dikalangan masyarakat terutama para penyedia jasa angkutan umum konvensional yang merasa dirugikan dengan munculnya transportasi online. Mereka beranggapan bahwa munculnya transportasi online menyebabkan penurunan minat dari pengguna jasa transportasi umum konvensional yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan perolehan pendapatan yang sangat signifikan. Bahkan para pengemudi angkutan umum konvensional melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menyatakan penolakan terhadap munculnya transportasi online dan menuntut pemerintah untuk mencabut izin penyelenggaraan transportasi online yang diberikan.

Untuk mengatasi beberapa permasalahan yang timbul karena adanya pro-kontra atas kehadiran transportasi online, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang bertujuan untuk mengakomodasi dan mengatur segala kegiatan pengangkutan atau transportasi umum baik secara online ataupun konvensional agar tidak terjadi lagi permasalahan antara transportasi online dengan transportasi

⁶Atika Zahra. 2017. *Skripsi Tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi Harga, Dan Citra Merek Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa Ojek Online*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta

konvensional serta sekaligus menjadi payung hukum yang jelas bagi transportasi online. Kemudian ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PM 108/2017 khususnya yang terkait dengan transportasi online yaitu diantaranya adalah: Transportasi online masuk sebagai kategori angkutan sewa khusus, pembatasan kewenangan perusahaan aplikasi dalam penyelenggaraan angkutan online, dan penetapan tarif batas bawah serta tarif batas atas.

Perusahaan penyedia jasa transportasi online ini memberikan kontribusi positif kepada pemerintah melalui perolehan pajak yang didapat dari penyelenggaraan transportasi online. Dilansir dari laman klinikpajak.com, pengamat pajak Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Reza Hafiz, mengungkapkan potensi pajak dari ojek online bisa mencapai Rp.14Miliar setahun.⁷

Selain berpotensi memberikan perolehan pajak kepada pemerintah, adanya perusahaan transportasi online ini juga membantu pemerintah dalam hal penyediaan lapangan kerja. Perusahaan transportasi online sudah merekrut kurang lebih sekitar 2juta pengemudi sebagai mitra dalam menjalankan kegiatan bisnis di bidang transportasi online. Untuk Gojek sendiri telah mencapai lebih dari 1juta *driver* jumlah tersebut merupakan data terakhir yang diungkapkan pada bulan februari 2018.⁸Sedangkan Grab sendiri mencatat

⁷Admin KlinikPajak, 2016, *Potensi Pajak Dari Ojek Online Bisa Capai Rp14Miliar/Tahun*,<http://www.klinikpajak.co.id>. Diakses Tanggal 16 Februari 2018 pukul 15.50

⁸ Koran Sindo Edisi 13 Februari 2018

jumlah mitra yang telah bergabung sampai dengan tahun 2017 telah mencapai 930ribu.⁹

Layanan transportasi online sendiri telah hadir di lebih dari 100 kota di Indonesia yang tersebar dari sabang sampai merauke.¹⁰ Hal tersebut menunjukkan bahwa jasa transportasi online dapat dinikmati dan digunakan oleh masyarakat di hampir sebagian besar wilayah Indonesia.

Dengan adanya jasa transportasi online sangat memudahkan masyarakat dan sangat memberikan manfaat kepada masyarakat. Manfaat dari adanya jasa transportasi ojek online ini tidak hanya bisa dirasakan oleh masyarakat sebagai konsumen namun bisa memberikan manfaat masyarakat yang sedang membutuhkan pekerjaan yaitu sebagai lapangan pekerjaan yang juga dibutuhkan oleh masyarakat, selain itu masyarakat yang memiliki usaha yang memerlukan jasa pengiriman juga bisa melakukan kerjasama kemitraan dengan penyedia jasa ojek online sehingga dapat dengan mudah mendistribusikan atau mengirimkan barang dagangan kepada konsumen.

Masyarakat dapat dengan mudah untuk bergabung sebagai mitra kerja penyedia jasa ojek online yaitu sebagai driver ojek online, hal ini tentunya memberikan manfaat yang sangat besar karena dapat menyerap tenaga kerja yang besar meskipun hanya sebagai mitra. Dalam hal untuk menjadi driver ojek online maka calon driver ini perlu melakukan perjanjian dengan Perusahaan penyedia jasa ojek online.

⁹ Grab. 2017. *Press Center* <https://www.grab.com> . Diakses Tanggal 18 Februari 2018 Pukul 21.00 WIB

¹⁰Tribun News. 2017. *Ojek Online Jadi Biang Kemacetan* <http://www.tribunnews.com>. Diakses Tanggal 20 Februari 2018 Pukul 12.00 WIB

Perjanjian merupakan peran penting dalam melakukan kegiatan bisnis terutama dalam hal kemitraan. Hukum perjanjian mengatur segala kegiatan dan ketentuan-ketentuan agar bisnis bisa berjalan dengan lancar, tertib dan aman sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis tersebut.

Hubungan hukum yang terjalin antara *driver* dan Perusahaan menggunakan Perjanjian Kerjasama Kemitraan.¹¹ Perjanjian kemitraan merupakan salah satu perjanjian yang tidak terdapat dalam buku III BW yang timbul dari asas kebebasan berkontrak.

Perjanjian Kemitraan yang digunakan dalam kerjasama antara Perusahaan penyedia jasa transportasi online dengan *driver* harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM pada bab VIII dimana dijelaskan bahwa didalam isi perjanjian kemitraan sekurang-kurangnya harus mengatur mengenai kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan. Kemudian mengenai pelaksanaan dari UU No 20 Tahun 2008 diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, yang pada intinya pelaksanaan kemitraan harus berlandaskan pada prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan.

Pada saat melakukan pekerjaannya sebagai mitra kerja tidak jarang pihak *Driver* mengalami *Evenement* yang dapat mengakibatkan kerugian pihak *Driver*. Pengertian dari *Evenement* (evenemen) adalah peristiwa yang menurut pengalaman manusia normal tidak dapat dipastikan terjadi, atau walaupun

¹¹ I Wayan Wiryawan.(et.al.) 2017. *Jurnal Hukum Tentang Analisis Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT.Gojek Dengan Driver Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Fakultas Hukum. Universitas Udayana

sudah pasti terjadi, saat terjadinya itu tidak dapat ditentukan dan juga tidak diharapkan akan terjadi, jika terjadi juga mengakibatkan kerugian.¹²

Ada beberapa *Evenement* atau kejadian-kejadian tidak terduga yang dapat mengakibatkan kerugian pihak *Driver* yang sering dialami oleh *Driver* diantaranya yaitu : Pembatalan pesanan secara mendadak dengan memutuskan koneksi dari pihak konsumen atau pengguna jasa ojek online tanpa alasan yang jelas, adanya order fiktif dari konsumen yang tidak bertanggung jawab yang memberikan alamat tidak benar dalam pemesanan layanan antar, kecelakaan lalu lintas pada saat melakukan pekerjaan sebagai *Driver*, dan banyaknya ancaman dari ojek pangkalan atau transportasi umum konvensional di kawasan-kawasan tertentu.

Adanya beberapa fitur dan layanan yang diberikan oleh penyedia jasa transportasi online untuk konsumen, dapat berpotensi mengakibatkan kerugian pada pihak *Driver* sebagai mitra kerja penyedia jasa transportasi online, beberapa fitur yang berpotensi mengakibatkan kerugian pihak *Driver* tersebut diantaranya adalah : Layanan antar-jemput penumpang, layanan pesan antar makanan dan barang, layanan pengiriman barang.

Pada saat *Driver* menerima orderan, memesan makanan dan/atau barang yang dipesan dengan membayar terlebih dahulu pesanan tersebut, kemudian mengantarkan pesanan tersebut ke tempat yang ditentukan pemesan. Berdasarkan pengamatan, penulis menemukan kelemahan pada sistem layanan tersebut, karena tidak jarang pemesanan yang dilakukan oleh konsumen yang

¹²Abdulkadir Muhammad, 2015, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 120

tidak bertanggung jawab melalui aplikasi yang memberikan alamat tujuan yang tidak benar atau konsumen memutus koneksi saat pengantaran pesanan oleh *driver* sedang berlangsung.

Sistem tersebut jelas berpotensi merugikan pihak *driver* karena mekanisme pembayaran dalam aplikasi ini membebankan kepada *driver* untuk membayar pesanan yang telah dipesan lalu kemudian diantarkan ke alamat yang diberikan oleh pemesan. Kejadian seperti ini membuat *driver* mengalami kerugian karena telah membayar pesanan tersebut terlebih dahulu. Permasalahan ini diperparah dengan tidak adanya mekanisme ganti rugi yang diberikan pihak penyedia jasa transportasi online.

Beberapa permasalahan yang ditemukan oleh penulis mengenai kerugian yang dialami oleh *driver* akibat dari evenemen tersebut, Penulis memilih Gojek selaku penyedia transportasi berbasis aplikasi online sebagai objek penelitian terkait permasalahan tersebut, karena menurut Penulis PT.Gojek Indonesia merupakan penyedia jasa transportasi online yang dianggap memiliki layanan yang lebih lengkap dan selalu menjadi andalan dalam memberikan layanan layanan terbaik diantara penyedia jasa transportasi online yang lain.

Oleh karena itu penulis ingin mengetahui sejauh mana tanggungjawab dan perlindungan hukum antara pihak gojek dengan *driver* terkait permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dibahas dilatar belakang, maka penulis mengangkat permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian elektronik PT.Gojek Indonesia?
2. Apa saja bentuk-bentuk *evenemen* yang dapat merugikan pihak *driver* Gojek dalam melakukan pekerjaannya sebagai mitra?
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh *Driver* Gojek akibat dari *evenemen* yang ada sebagai mitra kerja PT.Gojek Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui, memahami, dan mendiskripsikan hubungan hukum para pihak dalam perjanjian elektronik PT. Gojek Indonesia.
2. Untuk mengetahui, memahami dan, mendiskripsikan bentuk bentuk *evenemen* yang mengakibatkan kerugian pada pihak *driver* sebagai mitra kerja PT.Gojek Indonesia.
3. Untuk mengetahui, memahami dan, mendiskripsikan tentang bentuk pertanggungjawaban atas *evenemen* yang mengakibatkan kerugian pihak *driver*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan-kepentingan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis maupun praktisi serta masyarakat umum untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai perjanjian kemitraan antara PT.Gojek Indonesia dengan *Driver* dalam kegiatan bisnis transportasi online, serta dapat memberikan pengetahuan dan informasi terkait penyelesaian hukum atas kerugian yang diderita pihak *driver* ojek online.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan informasi bagi pengembang ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum khususnya dalam hukum perjanjian terhadap suatu masalah yang muncul dalam perjanjian kemitraan antara PT.Gojek Indonesia dengan pihak *driver* sehingga dapat ditemukan penyelesaian dan perlindungan hukum terhadap *driver* ojek online yang mengalami kerugian saat menjalankan tugasnya sebagai mitra kerja PT.Gojek Indonesia.
- b. Sebagai pengetahuan dan wawasan maupun wacana keilmuan tentang perlindungan hukum dalam perjanjian kemitraan antara PT.Gojek Indonesia dengan *driver* sebagai mitra.

E. Kegunaan

Penelitian ini berguna dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan minat terhadap ilmu hukum yang khususnya dalam konsentrasi hukum perdata bisnis, dan diharapkan dapat menjadi referensi dalam penulisan hukum dikemudian hari dan penulis berharap penelitian ini dapat memberikan dampak positif yang diantaranya adalah :

1. Bagi Penulis

Penulisan hukum ini dibuat dengan harapan dapat memberikan manfaat tambahan pengetahuan pihak-pihak yang membacanya mengenai perlindungan dan penyelesaian hukum atas evenemen yang mengakibatkan kerugian pihak *driver* go-jek. Di samping itu,kegunaan yang didasarkan pada alasan subjektif penulis dalam melakukan penelitian hukum ini ialah berguna sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi *Driver*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi terhadap suatu masalah hukum khususnya dalam penyelesaian dan perlindungan hukum terhadap Driver ojek online yang mengalami kerugian saat menjalankan tugasnya sebagai mitra kerja PT.Gojek Indonesia.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi agar kedepannya perusahaan lebih memerhatikan segala aspek terkait perlindungan terhadap mitra kerja.

4. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi agar pemerintah bisa mengeluarkan suatu regulasi atau peraturan mengenai transportasi umum berbasis online sehingga dapat dijadikan payung hukum dalam menjalankan kegiatan bisnis transportasi online.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan pada suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹³

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesain terhadap sebuah masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan penelitian atau penulisan.¹⁴

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang artinya bahwa penelitian ini melakukan kajian terhadap keadaan nyata

¹³Soerjono Sukanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia (UI) Press. Hal 433

¹⁴Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Penerbit Citra Aditya Bakti. Hal 112

yang terjadi dimasyarakat atau lingkungan masyarakat dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta yang kemudian dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada yang pada akhirnya menemukan sebuah penyelesaian masalah.¹⁵ Penulis dalam penulisan hukum akan mengkaji mengenai penyelesaian dan perlindungan hukum bagi Driver ojek online yang mengalami kerugian pada saat melakukan prestasinya sebagai mitra kerja PT.Gojek Indonesia.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah sebuah tempat yang digunakan sebagai objek yang akan dikaji dalam penelitian yang dilakukan. Penentuan lokasi penelitian menjadi unsur penting yang akan lebih mudah dalam menentukan pertanggungjawaban terhadap sebuah data yang digunakan sebagai penelitian. Penulis dalam hal ini melakukan penelitian di PT.Gojek Indonesia Kantor Perwakilan Kota Kediri.

3. Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

- a) Sumber Data Primer, ialah data yang diperoleh dan kemudian dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama terhadap permasalahan yang dikaji.¹⁶ Sumber data primer: Wawancara dengan

¹⁵Soejono Soekanto. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
Hal 10

¹⁶Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal 30

pihak PT.Gojek Indonesia Kantor Perwakilan Kota Kediri, dan wawancara dengan 15 orang driver gojek yang dipilih secara acak di kota Kediri.

- b) Sumber Data Sekunder, ialah data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber lain yang pernah mengumpulkan dan mengolahnya sebelumnya, yang dapat berupa data-data dari buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, website resmi yang pada pokoknya sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, website resmi dan literatur lain yang terkait pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses dimana terjadi interaksi yang berupa dialog tanya jawab yang dilakukan oleh penanya dan narasumber. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang benar dan akurat dari sumber yang ditentukan dalam penelitian. Penulis dalam wawancara akan mencari informasi kepada: Pihak PT.Gojek Indonesia Kantor Perwakilan Kota Kediri, dan wawancara dengan 15 orang driver gojek yang dipilih secara acak di kota Kediri.

b. Studi Dokumentasi

Penulis melakukan pengumpulan data dengan sumber data tertulis yang dapat berupa dokumen resmi. Pengumpulan data terhadap data-data yang diperlukan dan relevan dengan penelitian yang dibahas baik data yang diperoleh secara langsung dari PT.Gojek Indonesia Kantor Perwakilan Kediri dan Pihak Driver gojek.

5. Teknik Analisa Data

Agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan jawaban yang tepat terhadap masalah yang dirumuskan maka pemilihan teknik analisa yang tepat sangat penting. Analisa merupakan tindak lanjut dari penulis dalam mengolah hasil penelitian menjadi sebuah laporan yang diharapkan. Teknik analisa yang digunakan penulis adalah dengan cara menarik kesimpulan dari pembahasan.

Dari data yang diperoleh kemudian penulis mencoba untuk menganalisa secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu sebuah metode analisa data yang dilakukan dengan cara pengelompokan dan penyeleksian data yang didapatkan dari penelitian lapangan menurut kualitas kebenaran dan keakuratannya, kemudian diselaraskan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat.

G. Sistematika Penulisan

Pada penyusunan penulisan hukum, penulis membagi membagi dalam empat bab dan masing-masing bab terdiri dari sub bab yang bertujuan untuk mempermudah dalam memahami, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang didalamnya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penulisan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang kajian-kajian, deskripsi atau uraian terkait dengan permasalahan yang diangkat, meliputi: tinjauan umum terkait teori hukum perjanjian, perjanjian kemitraan, hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kemitraan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini berisikan tentang uraian pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yang kemudian dianalisa kesesuaian atau keselarasan berdasarkan kenyataan yang terjadi dan didukung dengan teori-teori.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan terkait dengan pembahasan dari bab dan sub bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran penulis dalam menghadapi permasalahan yang menjadi fokus pembahasan.